
 <p>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	012/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
	Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Ditetapkan Oleh	<p>DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>





PENJATUHAN POIN KESALAHAN TARUNA

ISO 9001:2015

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. KM 43 tahun 2008 tentang pendidikan dan pelatihan, dan ujian keahlian, serta sertifikat kepelautan; 12. Peraturan Menteri perhubungan RI No. KM 52 tahun 2007 tentang pendidikan dan pelatihan transportasi; 13. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 14. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.11/ BPSDMP-2014 Tentang Pola Pengasuhan Taruna/i Diklat Pembentukan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; 15. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2163/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Keahlian Pelaut Tingkat III non Diploma (Crash Program/ Fast Track); 16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan No. SK. 2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan; 	<p>Dilakukan kegiatan Penjatuhan Poin Kesalahan Taruna sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> <p>DOKUMEN INDUK</p> </div>

<p>17. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan nomor SK.827/HM.208/VII/Diklat-07 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Peserta Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;</p> <p>18. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</p> <p>19. ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.</p>	
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<p>Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja.
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP Penjatuhan Poin Kesalahan Taruna tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	

SOP PENJATUHAN POIN KESALAHAN TARUNA

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA		TERTUDUH	MUTU BAKU			KET
		KA.PPK	PERWIRA KOMPI		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	1. Merekap poin pelanggaran taruna 2. Mengeluarkan tuduhan pelanggaran berlaku 1x24 jam				1. Laporan pelanggaran 2. Berita acara pelanggaran	2 hari	Laporan pelanggaran	Berdasarkan PERTIBTAP
2	Menerima laporan rekap poin pelanggaran dan tuduhan pelanggaran dari perwira kompi				Berita acara tuduhan	1 jam	Laporan tuduhan	
3	Mengajukan keberatan terhadap tuduhan yang ditujukan ke Ka. PPK				Berita acara pengajuan keberatan	1 hari	Laporan pengajuan keberatan	
4	1. Melakukan Penjatuhan poin kesalahan oleh Ka PPK. 2. Melakukan Rekapitulasi poin kesalahan. 3. Mengajukan surat permohonan SP1/ SP2/ SP3 jika poin telah mencapai SP1/SP2/SP3. 4. Menyimpan copy file surat Peringatan taruna yang bermasalah di file PPK.				1. Berita acara penjatuhan poin. 2. Berita acara rekapitulasi poin kesalahan 3. Surat Permohonan 4. Laporan	95 menit	1. Laporan penjatuhan poin 2. Laporan rekapitulasi 3. Laporan surat permohonan 4. Hasil laporan ter file	Jika iya maka lanjut ke tahap selanjutnya, Jika tidak maka kembali ke tertuduh

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENJATUHAN POIN KESALAHAN TARUNA

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	Perubahan format SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
02	<p>- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat</p> <hr/> <p>Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p>	23/06/2022
	- Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020